

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Relasi Elit Pesantren dan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan PERDA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya”. Terbentuknya Peraturan Daerah ini, dilatarbelakangi karena adanya gerakan penegakan Syariat Islam yang di inisiasi oleh kelompok elit pesantren (Kiai). Modernisasi menjadi penyebab dari adanya kemerosotan moral di kota Tasikmalaya sehingga memunculkan upaya untuk memformalisasikan nilai-nilai islam kedalam sebuah kebijakan dengan tujuan mengembalikan moralitas masyarakat kepada religiusitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana relasi yang terjadi antara elit pesantren dan pemerintah daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Elit, Transformasi Pesantren dan Kelompok Penekan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara mendalam. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive* dan *Snowball Sampling*. Validitas data menggunakan Triangulasi data dan Analisis data yang digunakan adalah Analisis Interaktif dengan pengumpulan data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan penegakan peraturan daerah Syariat Islam yang termuat pada Perda Nomor 12 Tahun 2009 dan Perda Nomor 7 Tahun 2014 sebagai revisinya, tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Didukung karena adanya relasi harmonis yang dijalin antara Elit Pesantren dan Pemerintah Daerah. Relasi yang terjadi membentuk sebuah pola hubungan *Simbiosis Mutualisme* dimana kedua belah pihak diuntungkan. Relasi keduanya secara terus menerus berulang karena dipengaruhi oleh Kewibawaan Tradisional yang melekat pada seorang Kiai. Kepatuhan masyarakat kepada Kiai menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya dan Elit politik. Kiai menginginkan penegakan Syariat Islam dan memerlukan dukungan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan sebaliknya elit politik menginginkan dukungan Kiai agar dipilih masyarakat karena masyarakat sangat patuh dan taat kepada seorang Kiai.

Kata Kunci: Relasi Elit, Perda Syariat, Kebijakan Publik

ABSTRACT

This study entitled "The Elite Relationship between Islamic Boarding Schools and Local Government in Making PERDA Number. 7 of 2014 concerning the Values of Religious Community Life in the City of Tasikmalaya". The formation of this Regional Regulation was motivated by the existence of the Islamic Sharia enforcement movement which was initiated by an elite group of pesantren (Kiai). Modernization is the cause of moral decline in the city of Tasikmalaya, which has led to efforts to formalize Islamic values into a policy with the aim of returning the morality of society to its religiosity. This study aims to reveal and analyze how the relationship between pesantren elites and local governments in the making of these regional regulations.

The theory used in this research is Elite Theory, Islamic Boarding School Transformation and Pressure Groups. The research method used in this research is a qualitative research method with a case study approach. The data collection techniques in this study are by observing, documenting, and in-depth interviews. The sampling technique was carried out by purposive and snowball sampling. The validity of the data used data triangulation and data analysis used was interactive analysis with data collection, and drawing conclusions.

The result of this research is the successful enforcement of Islamic Sharia regional regulations contained in Regional Regulation Number 12 of 2009 and Regional Regulation Number 7 of 2014 as revisions, concerning the Values of Religious Community Life in the City of Tasikmalaya. Supported by the harmonious relationship between the Islamic Boarding School Elite and the Regional Government. The relationship that occurs forms a pattern of Symbiotic Mutualism in which both parties benefit. The relationship between the two is continuously repeated because it is influenced by the Traditional Authority inherent in a Kiai. Public obedience to Kiai is a distinct advantage for him and the political elite. Kiai want the enforcement of Islamic Sharia and need support from the government as a policy maker, and conversely the political elite wants Kiai's support to be elected by the community because people are very obedient and obedient to a Kiai.

Keywords: Elite Relations, Sharia Regional Regulations, Public Policy